

**PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDes) DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK  
PANDAN KABUPATEN PESAWARAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Dakwah**

**Oleh :**

**M. Atshil M.A  
1341020040**

**Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/2017 M**

**PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDes) DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK  
PANDAN KABUPATEN PESAWARAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Dakwah  
Oleh :**

**M. Atsil M.A  
1341020040**

**Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam**

**Pembimbing I : Dr. Jasmadi, M.Ag**

**Pembimbing II : Zamhariri, M.Sos.I**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/2017 M**

## **ABSTRAK**

# **PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh :  
M. Atsil, M.A**

Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan di mulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah masuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan Desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu di mobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat di rasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Hadirnya BUMDes merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat.

Sehubungan hal di atas, permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata.

Penulis mengambil data sampel dengan menggunakan purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang penulis berikan maka sampel berjumlah 10 orang. Alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui di buka beberapa unit usaha yang jug merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan adanya BUMDes diharapkan mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci : Pengembangan Ekonomi Masyarakat, BUMDes**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Alamat: Letnan Kolonel H. Endro Suratmin telp: 0721-704030 Sukarame I Bandar Lampung 35131*

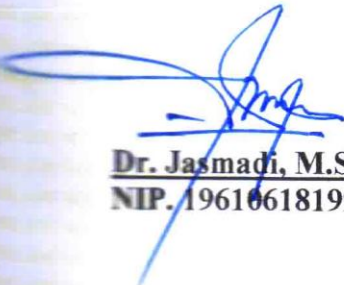
**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul : **PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK  
PANDAN KABUPATEN PESAWARAN** yang ditulis oleh :

Nama : M. Atshil M. A.  
NPM : 1341020040  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam


Telah diperiksa dan dikoreksi oleh pembimbing I dan pembimbing II. Maka dari itu  
pembimbing I dan pembimbing II menyetujui untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam  
sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**


  
**Dr. Jasmadi, M.Si**  
**NIP. 196106181990031003**

**Bandar Lampung, 01 Oktober 2017**

**Pembimbing II**

  
**Zamhariri, M.Sos.I**  
**NIP. 197306012003121002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan PMI**

  
**Zamhariri, M.Sos.I**  
**NIP. 197306012003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Alamat: Letnan Kolonel H. Endro Suratmin telp: 0721-704030 Sukarame I Bandar Lampung 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN**, yang disusun oleh : **M. Atshil M.A, NPM:1341020040**, Jurusan: **Pengembangan Masyarakat Islam**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Hari Jum'at 13 Oktober 2017.

**DEWAN PENGUJI**

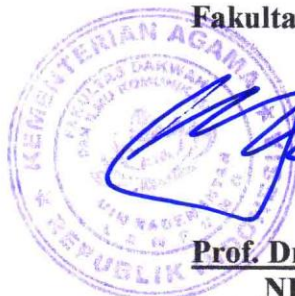
**Ketua** : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si (.....)

**Sekretaris** : M. Husaini, M.T. (.....)

**Penguji I** : Faizal, M.Ag (.....)

**Penguji II** : Dr. Jasmadi, M.Ag (.....)

**Dekan,**  
**Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si**  
**NIP. 196104091990031002**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Atsil M.A

NPM : 1341020040

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran**, adalah murni hasil pribadi tidak mengandung *plagiarisme* dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau tulis oleh orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dan tata cara yang benar secara ilmiah.

Dengan pernyataan ini saya buat, apabila kemudian hari terdapat *plagiarism*, maka saya bersedia menerima yang benar secara ilmiah.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2017  
Pembuat Pernyataan

M. Atsil M.A  
1341020040

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ  
مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

*Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Qs. Ar-Raad:11)*





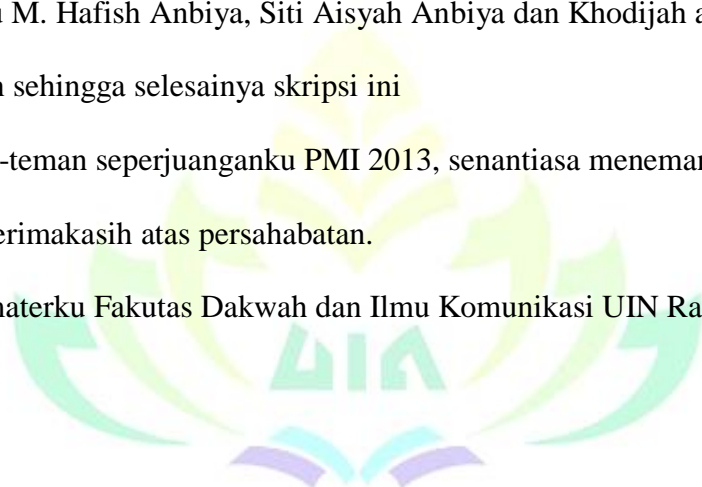
## **PERSEMBAHAN**

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, karya kecil in dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan bangga, saya persembahkan karya kecil in untuk Ayahanda tercinta Herry Wardono dan Ibunda Simparmin Ginting , atas segala doa dan perjuangannya demi tercapainya keberhasilan studyku, yang tidak pernah lelah membahagiakan ku.

Adikku M. Hafish Anbiya, Siti Aisyah Anbiya dan Khodijah atas motivasi yang diberikan sehingga selesainya skripsi ini

Teman-teman seperjuanganku PMI 2013, senantiasa menemani masa-masa perkuliahan. Terimakasih atas persahabatan.

Almamaterku Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

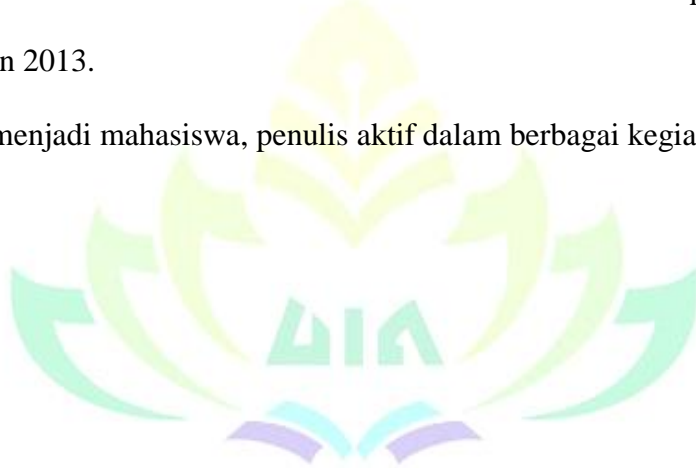


## **RIWAYAT HIDUP**

M. Atsil M.A, di lahirkan di Rajabasa, 23 Maret 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Herry Wardono dan IbuSimparmin Br Ginting.

Pendidikan di mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah pada tahun 2007.MTS Sunanul Huda Natar dan selesai tahun 2010, dan Madrasah Aliyah MA Sunanul Huda Natar pada tahun 2013. Melanjutkan kependidikan tingkat perguruan tinggi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN RadenIntan Lampung di mulaipadatahun 2013.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan intra maupun ekstra.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.”** Shalawat beriring salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. beserta Keluarga, para sahabat, dan semoga kita termasuk umatnya sampai akhir hayat.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Tersusun skripsi tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak, kiranya tidak berlebihan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama perkuliahan.
2. Bapak Dr. Jasmadi. M.Si, selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam skripsi ini.

3. Bapak Zamhariri, M.Sos.I, selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Jurusan PMI yang telah memberikan bantuan dan izin dalam penelitian ini.
4. Aparat Desa, Pengurus dan Anggota BUMDes Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atas bantuan data, kesempatan, fasilitas kepada penulis selama penelitian
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung atas diperkenankannya penulis meminjam buku literatur yang dibutuhkan.
7. Semua pihak yang ikut memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi in.

Penulis sadar skripsi in jauh dari kesempurnaan, namun inilah karya dan sumbangan yang dapat penulis berikan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis nantikan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2017

M. Atsil M.A  
1341020008

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II: PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUMDES</b>	
<b>A. Dasar Kebijakan Pemerintah tentang BUMDes</b>	
1. Kedudukan BUMDes .....	25
2. Implementasi Kebijakan BUMDes.....	29
3. Dasar Hukum Usaha Meningkatkan Taraf Hidup .....	31

**B. Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

1. Konsep Pengembangan Masyarakat .....35
2. Konsep Pemberdayaan .....37
3. Pemberdayaan sebagai Proses Pengembangan Ekonomi Masyarakat .....39

**C. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes .....45**

**BAB III : PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUMDES DESA HANURA**

**A. Gambaran Umum Desa Hanura**

1. Sejarah Singkat Desa Hanura .....50
2. Kondisi geografis dan demografis Desa Hanura ..... 52

**B. Gambaran Umum BUMDes Desa Hanura**

1. Organisasi ..... 61
2. Struktur Kepengurusan BUMDes ..... 61
3. Tujuan Berdirinya BUMDes .....62

**C. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes**

1. Pengelolaan BUMDes dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat ..... 62
2. Kegiatan Usaha BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat ..... 70
3. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengembangan Ekonomi .....73

**BAB IV : PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUMDes**

**A. Pengembangan Ekonomi Melalui BUMDes ..... 77**

**B. Partisipasi Masyarakat Desa Hanura terhadap Pengelolaan BUMDes..84**

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan ..... 87**

**B. Saran ..... 88**

**DAFTAR PUSTAKA..... 90**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel1 :UrutanJabatanKepalaDesaHanura .....	
Tabel2 :JumlahPendudukMenurutKepalaKeluarga .....	
Tabel 3.JumlahPendudukBerdasarkanUmur .....	
Tabel 4.JumlahPendudukBerdasarkan Tingkat Pendidikan.....	
Tabel 5.PrasaranaDesa yang dimilikiDesaHanura .....	
Tabel 6. Mata PencarianPendudukDesaHanura .....	
Tabel. 7 KepengurusanBUMDesHatiNurani .....	





## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran-lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Dokumentasi
4. Daftar Sampel
5. Gambar
6. SK Judul
7. Kartu Konsultasi Skripsi
8. Kartu Hadir Munas
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
10. Surat Keterangan Kepala Desa Hanura
11. Surat Keterangan Ketua BUMDes



## **DAFTAR GAMBAR**

1. Dokumentasi kondisi Geografis Desa Hanura
2. Dokumentasi aktivitas ekonomi masyarakat
3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan BUMDes
4. Dokumentasi bersamasampel



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Penegasan judul merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penulisan skripsi. Penegasan judul ini akan memperjelas pokok permasalahan yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pengertian judul skripsi ini, maka penulis menguraikan makna yang terdapat dalam judul skripsi, yaitu : “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.”

Pengembangan, secara etimologi berasal dari kata kembang yang berarti proses, cara dan pembuatan. Pengembang dapat di artikan sebagai pembinaan dan peningkatan kualitas suatu masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Secara teminologi pengembangan adalah usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang pembangunan meliputi: ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.<sup>1</sup> Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses peningkatan kuliatas kehidupan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa yunani “Oikonomia” yang terdiri dari kata “oikos” yang berarti rumah tangga dan “nomos” yang berarti aturan. Kata “Oikonomia” mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.(Bandung : Pt. Rekan Aditama, 2010),h.39

hidup rumah tangga.<sup>2</sup> Henri faisal juga mendefinisikan bahwa ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup> Maka ekonomi merupakan kegiatan peningkatan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan untuk mencukupi kebutuhan hidup secara materi.

Masyarakat sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan yang sama, perasaan yang memiliki dan biasanya satu tempat yang sama. Fungsi masyarakat yaitu penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan usaha, keamanan public, sosialisasi, wadah dilingkungan bersama atau gotong royong, *control social*, organisasi dan partisipasi politik.<sup>4</sup>

Pengembangan ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan *life skill* ( keahlian hidup) yang dimiliki oleh masyarakat. <sup>5</sup> Pengembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan kondisi pendapatan masyarakat kearah yang lebih maju sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009),h. 2

<sup>3</sup> Henry Faisal, *Ekonomi Media*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), h. 2

<sup>4</sup>Ibid, h. 7

<sup>5</sup> Edi Sueharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* : Jurnal Comdev, ( Jakarta : BEMJ,PMI, 2004), h.3

<sup>6</sup>Rinal Purba, *Pengertian Perkembangan Ekonomi*, terdapat di <http://RinaldiePurbaSiboroAkunt.blogspot.com/2013/10/Perkembangan-Ekonomi.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2017

Sedangkan BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penelitian ini merupakan suatu study tentang upaya mengubah berbagai potensi yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui partisipasi pengelolaan BUMDes.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dalam prosesnya mengedepankan partisipasi masyarakat untuk bertindak memperbaiki kondisi perekonomian, sehingga memperkecil sifat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah namun masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola potensi desa dengan sebaik-baiknya.
2. BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dapat menggerakkan kegiatan ekonomi

---

<sup>7</sup>Admikon koperasi.net Oct 23, 2016, terdapat di <http://www.koperasi.net/2016/10/bumdes-dan-koperasi-desa.html>, di akses pada tanggal 12 April 2017

masyarakat yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan melalui mobilisasi sumber daya alam dan potensi desa lainnya.

3. Penelitian ini sangat relevan dengan jurusan yang diambil oleh penulis yaitu Pengembangan Masyarakat Islam. Secara literatur, lokasi penelitian serta waktu sangat terjangkau dan mendukung untuk dilakukan penelitian oleh penulis.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk

---

<sup>8</sup>Dita Angga Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa*, ditulis pada tanggal 26 Januari 2017, terdapat di <https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desa-1485440604>, diakses pada tanggal 10 April 2017

pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>9</sup> Pembangunan Nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sector ekonomi. Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama, namun tingkat keberhasilannya belum secara optimal tercapai. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Menurut Sumpeno, strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.<sup>10</sup> Beberapa strategi yang secara umum diimplementasikan dalam membangun kemandirian desa antara lain:

---

<sup>9</sup> H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3

<sup>10</sup> Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Aceh: The World Bank, 2011), h. 8



(1) membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis, (2) memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, (3) membangun sistem perencanaan dan penyelenggaraan desa yang responsif dan partisipatif, dan (4) membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.<sup>11</sup> Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal telah banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya.

Pengaturan desa antara lain bertujuan *mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional*.<sup>12</sup> Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masalah mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai

---

<sup>11</sup> Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 27.

<sup>12</sup><http://www.presidenri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html>, diakses pada tanggal 12 April 2017

tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya. Adapun untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan. Diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal, dan (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan

mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).<sup>13</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan.

BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah *Bottom-up planning*) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

---

<sup>13</sup> Kementrian Negara, “Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal” terdapat di <http://www.kemenegpd.go.id/> , diakses pada tanggal 12 Juni 2017

peningkatan kesejahteraan warga desa.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ovi Era Tam dengan judul *Dampak Badan Usaha Milik Desa bagi Kesejahteraan masyarakat di Desa Karang Rejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul* dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usaha yang direncanakan.<sup>15</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arrafiqur rahman dengan judul *peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat ( studi pada BUMDes desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Okan Hulu)* ditarik kesimpulan bahwa peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya. Untuk itu penulis menyarankan kepada pengguna dana BUMDes harus mempertahankan peningkatan perekonomiannya dan mengembangkan hasil dari usahanya, dan berhati-hati dalam menggunakan dana yang diperoleh.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Reza M. Zulkarnaen *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta* juga ditarik kesimpulan bahwa Keberadaan BUMDES untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDES

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), h 4.

<sup>15</sup> Ovi Era Tam dengan judul *Dampak Badan Usaha Milik Desa bagi Kesejahteraan masyarakat di Desa Karang Rejek Kecamatan Wonosari*, Skripsi tahun 2015, terdapat di [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id) diakses pada tanggal 12 Juni 2017

<sup>16</sup> Arrafiqur rahman, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat ( Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Okan Hulu)*, skripsi tahun 2015. Terdapat di [digilib.uinsby.ac.id/2553/3/Bab%202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/2553/3/Bab%202.pdf), diakses tanggal 12 Juni 2017

diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.<sup>17</sup>

Adapun tugas dan peran pemerintah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah (*Bottom-Up Planning*) dan perencanaan dari atas (*Top-Down Planning*). Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah (*Bottom-Up Planning*) adalah bahwa BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas (*Top-Down Planning*) adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah.<sup>18</sup> Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

---

<sup>17</sup> Reza M. Zulkarnaen *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*, skripsi tahun 2017, terdapat di [digilib.Unpad.ac.id/11430-22005-1-SM](http://digilib.Unpad.ac.id/11430-22005-1-SM), diakses tanggal 12 Juni 2017

<sup>18</sup> Ibid, h. 26

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Hanura yang berada di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Desa Hanura merupakan Desa yang menjadi percontohan Desa untuk seluruh Desa provinsi Lampung. Keberhasilan pengelolaan BUMDes dalam pengelolaan potensi Desa menjadikan Desa Hanura sebagai desa teladan. Desa Hanura merupakan daerah transmigran yang mampu menjadi bagian penting dari usaha kolektif provinsi Lampung untuk meraih kemajuan.

Dalam kasus ini, pendirian BUMDes Hati Nurani termasuk ke dalam perencanaan pembangunan dari bawah (*Bottom-Up Planning*), hal ini karena BUMDes Hati Nurani tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan berdasarkan atas inisiatif dari salah satu warga desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha desa yang sebelumnya sudah ada agar dijadikan satu dalam sebuah lembaga desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya. Berdasarkan usulan warga tersebut kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78.

Pemerintah desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga desa tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon dengan antusias tentang

pendirian BUMDes tersebut. Hal ini juga karena faktor kondisi perekonomian warga yang sebagian rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif untuk mengembangkan usaha bersama melalui suatu lembaga desa guna mengatasi kesulitan yang dialami para warganya.<sup>19</sup>

BUMDes Hati Nurani didirikan pada tahun 2014, dengan usaha-usaha yang bergerak di dalamnya seperti Bank sampah yang mula dijadikan unit simpan pinjam disalurkan menjadi simpanan masyarakat untuk pembayaran BPJS. Adapun sumber modal awal BUMDes berasal dari bantuan berupa hibah dari pemerintah dan kemudian ada penguatan modal yang sebagian berasal dari hibah bergulir (usaha BUMDes sebelumnya).

Salah satu program BUMDes Hati Nurani dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu pembuatan sirup belimbing wuluh, dimana BUMDes memberikan suntikan dana kepada masyarakat untuk menanam belimbing yang secara langsung dikelola BUMDes. Belimbing tersebut diproduksi oleh BUMDes untuk dibuat sirup dan selai, pengerjaan produk dari Belimbing wuluh dilakukan langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini tentu memberi pemasukan tambahan bagi masyarakat setempat. Bukan hanya itu, BUMDes Hati Nurani juga memproduksi kripik tempe, kripik pisang dan klanjing yang diproduksi oleh masyarakat dan telah didistribusikan ke wilayah diluar Kecamatan Teluk Pandan, yang menjadi distributornya adalah “yenyen.” Melalui kegiatan itu, masyarakat memiliki kesempatan mendapat pekerjaan baru sehingga masyarakat mendapat penghasilan tambahan untuk meningkatkan

---

<sup>19</sup> Tri Joto, wawancara 12 oktober 2016



perekonomian mereka.

Berdasarkan keunikan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi pembahasan skripsi penulis tentang proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes serta menggali seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat tersebut.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Hanura Teluk Pandan Pesawaran ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Hanura Teluk Pandan Pesawaran dalam proses pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes?

#### **E. Tujuan**

1. Untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi melalui BUMDes di Desa Hanura Teluk Pandan Pesawaran
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Hanura Teluk Pandan Pesawaran dalam proses pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Pada tataran Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengembangan ekonomi

masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal yang dimiliki desa . Serta dapat menjadi referensi dalam hal keilmuan pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat Desa Hanura agar lebih partisipatif dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang dipergunakan.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial.<sup>20</sup> Secara terminologis, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

---

<sup>20</sup> Noor Juliansyah dan Ahmadi, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, ( Jakarta : Kencana, 2013), h. 34

orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>21</sup> Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperandalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes.

#### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membuat dekripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

Menurut Irawan Suehartono, penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.<sup>24</sup>

Penelitian dekskriptif ini ditunjang oleh teknik pengumpulan data antara lain survey literatur dan pengalaman. Survei *literature* dilakukan untuk

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 241.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 3.

<sup>24</sup> Irawan Suehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. 1, h. 35

memperoleh sumber data primer yakni dari buku teks dan data sekunder antara lain dari artikel jurnal, media cetak dan internet.

### **c. Populasi dan Sampel**

#### **1) Populasi**

Totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya, dinamakan populasi. Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek yang dibatasi oleh kriteria tertentu.<sup>25</sup>

Adapun yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat desa pandan yang aktif dalam kegiatan BUMDes dan yang tidak. Maka jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 5.216 jiwa 2.575 jiwa laki-laki dan 2.641 jiwa perempuan dan jumlah keluarga sebanyak 1.535 KK.

#### **2) Sampel**

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.<sup>26</sup>

Secara teknis dalam penarikan sampel, teknik yang digunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan

---

<sup>25</sup> Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2011), h. 121

<sup>26</sup> Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin, *Op. Cit.* h. 124

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>27</sup>

Penulis akan memulai interview dengan membuat kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa yang mengetahui proses pembentukan dan pelaksanaan program BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat
2. Pengelola BUMDes yang mengerti dan faham program pelaksanaan program BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, yang tergabung sejak awal pendirian BUMDes, serta aktif dalam pelaksanaan program BUMDes
3. Masyarakat asli Desa Hanura yang memiliki usaha dan tidak memiliki usaha namun mendukung BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat

Maka keseluruhan sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 orang. Dengan rincian sampel Aparat Desa berjumlah 4 orang, pengurus BUMDes berjumlah 6 orang, dan 6 orang masyarakat yang menjadi anggota BUMDes.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung, Alfabeta CV, 2013), h. 301

### 3) Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a) Metode Interview

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas topik tertentu. Metode interview mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dengan seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>28</sup>

Penulis menggunakan teknik interview dengan jenis *interview bebas terpimpin* yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara menggunakan pedoman yang merupakan garis besar terkait hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya, cara bagaimana pertanyaan itu diajukan dan teknis wawancara diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.<sup>29</sup>

Penulis melakukan interview tujuannya adalah untuk mendapatkan data informasi yang valid dan holistik sehingga kebenaran hasil penelitian dapat diukur langsung dari informan. Penulis dapat menggali data yang

<sup>28</sup> Koetjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Pt. Gramdia Pustaka), h.

<sup>29</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach* Cet. II, ( Bandung : Masdar Maju, 1996),

akurat mengenai BUMDes Hati Nurani, dan dengan teknik interview ada timbal balik antara peneliti dengan responden sehingga informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

#### **b) Metode Observasi**

Secara luas observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non-partisipan, maksudnya jika seseorang melakukan observasi (*observer*) tidak turut bagian dalam kehidupan objek atau orang-orang yang diobservasi (*observes*).<sup>31</sup>

Jadi, dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi hanya berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan. Metode observasi ini digunakan untuk menggali data terkait aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan BUMDes Hati Nurani di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>30</sup> Irawan Soehartono “ *Metode Penelitian Sosial*”, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h. 69

<sup>31</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 98.



### c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-surat resmi.<sup>32</sup>Data yang didapatkan bersumber dari dokumentasi tertulis yang resmi sesuai dengan keperluan penelitian agar data yang didapatkan valid, konkrit dan obyektif.

Kegiatan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung dalam melengkapi data-data terkait masalah penelitian yang penulis lakukan. Dengan dokumentasi menjadi bukti kebenaran penulis melakukan penelitian ini.

### d) Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.<sup>33</sup>

Karena penelitian yang penulis bahas sifatnya deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan

---

<sup>32</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hal. 73

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 280

antara dua gejala atau lebih.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini analisis data yang penulis gunakan bersifat deduktif yaitu berfikir secara Makro-Mikro dengan mengurutkan masalah atau situasi sosial dari yang umum lalu dikerucutkan ke yang lebih kecil agar mudah dilihat akar permasalahannya seperti apa.

Model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

### **1) Tahap Reduksi Data**

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.<sup>35</sup> Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data lapangan yang dilakukan secara *continue* yang diorientasikan secara kualitatif. Penulis melakukan pemilihan dan menelaah secara dalam keseluruhan data yang dihimpun lapangan mengenai pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

---

<sup>34</sup> Irawan Soehartono, *Op.Cit.* h. 35

<sup>35</sup> Irawan Soehartono, *Op.cit.* h. 37

## **2) Tahap Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini yaitu upaya kelompok sadar wisata (pokdarwis) karang upas dalam mengembangkan masyarakat berbasis ekowisata desa Waymuli serta partisipasi masyarakat terhadap upaya tersebut dapat diketahui dengan mudah. Dan penulis dapat mengklarifikasikan topik masalah, mengkode, menyajikan data sesuai dengan data lapangan dan teori yang penulis gunakan.

## **3) Tahap Verifikasi Data/ Penarikan Simpulan**

Tahap terakhir yang terpenting dalam penelitian ini adalah Verifikasi Data/ Penarikan Simpulan . Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.131

#### 4) Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi.<sup>37</sup>

Peneliti melakukan Triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari peneliti, serta mengcross cek data diluar subjek.

---

<sup>37</sup> *Supra* catatan kaki nomor 21 , h. 332

## BAB II

### PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUMDes

#### A. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

##### 1. Konsep Pengembangan Masyarakat

Twelvetreets dalam bukunya Zubaedi mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat adalah “ *The process of assisting ordinary people the improve their own communities by undertaking collective action* ”. <sup>38</sup>

Sedangkan menurut United Nation, Pengembangan masyarakat adalah “suatu proses yang didesain untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial untuk komunitas yang berhubungan dengan partisipasi aktif dan untuk memenuhi kemungkinan kepercayaan atas inisiatif komunitas”. <sup>39</sup>

Secara umum, pengembangan masyarakat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperluas, atau meningkatkan, atau mengubah potensi-potensi yang ada dalam suatu masyarakat ke suatu keadaan sebelumnya. <sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, pengembangan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Pengembangan masyarakat

---

<sup>38</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, ( Jakarta : Kencana, 2013), h. 5

<sup>39</sup> Luluhatta *Pengembangan Masyarakat* online, ada pada <https://luluhatta.wordpress.com/2014/10/13/pengembangan-masyarakat-community-development/>, diakses pada 13 Mei 2017

<sup>40</sup> Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, ( Kendari : Unhalu Press, 2011), h. 29

mencangkup aspek kuantitas, dan aspek kontinuitas serta meliputi dimensi cukup luas dan tatarannya yang bervariasi dari kognitif sampai kepada afektif.

Program selalu berasal dan untuk pemenuhan masyarakat, sehingga yang merencanakan adalah agen bersama masyarakat (kemandirian artinya tujuan utama dari program untuk mengentaskan masyarakat dengan dirinya sendiri, dan agen hanya sebagai stimulus. Keswadayaan artinya bahwa setiap program harus dilakukan dengan kemampuan diri sendiri, sehingga segala bentuk intervensi hanyalah sebagai insentif saja. Dan partisipasi diartikan bahwa setiap program melibatkan masyarakat, baik fisik, ide, dan materi. Keterlibatan disini memiliki makna keikutsertaan masyarakat secara fisik dan mentalitas.

Jim Ife dalam bukunya menganggap bahwa dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat, semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang diwujudkan. Partisipasi sangat penting untuk perubahan dari bawah dan sangat penting dalam mempertahankan fokus pada proses.<sup>41</sup> Pengembangan masyarakat memang menekankan pada proses, bukan hasil. Dimana dalam konsep pengembangan masyarakat berbeda dengan pembangunan yang didominasi oleh persoalan hasil dan tujuan. Namun untuk saat ini pengembangan masyarakat merupakan konsep dari pembangunan berbasis

---

<sup>41</sup> JIM Ife Frank Tesoriere, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 335

masyarakat, dimana dalam implementasinya partisipasi adalah prinsip fundamental dalam pengembangan masyarakat.

Indikator keberhasilan dalam pengembangan masyarakat adalah adanya kerja kolektif dari stakeholder pengembangan masyarakat itu sendiri. Yang menjadi stakeholder pengembangan masyarakat adalah :

- a. Pemerintah berperan dalam menciptakan gambaran program, mencari sumber dana, penglokasian dana, menjadi penghubung dengan pihak swasta
- b. Organisasi sebagai salah satu indikator dalam mendukung pemerintah sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintah
- c. Masyarakat adalah sebagai penerima manfaat dari upaya yang direncanakan pemerintah.<sup>42</sup>

## **2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Puji Hadiyanti, *Menjadi Fasilitator PM yang Kapabel*, disampaikan pada Pelatihan Fasilitator PMI bagi Mahasiswa PMI, 25 Februari 2017.

<sup>43</sup> Toto Mardikanto, Poerwono Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 61

Menurut Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan-nya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.<sup>44</sup> Maka secara operasional pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses memampukan dan memandirikan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki agar tidak ketergantungan dengan pemberian pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan, apabila dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat bukannya meningkatkan produksi. Konsep ini mengubah prinsip yang selama ini dianut, yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan pemenuhan target-target variable ekonomi makro. Upaya untuk mewujudkan tujuan ini, antara lain berupa pembentukan bentuk usaha kemitraan yang mutualistik antara orang lokal dengan orang-orang yang lebih mampu.

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :

1. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
2. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan, ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
3. Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan

---

<sup>44</sup> Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. (Meulbore : Addison Wesley Longman, 1997), h. 182



kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.<sup>45</sup>

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah : program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

46

### **3. Pemberdayaan sebagai Proses Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Di dalam konsep pengembangan masyarakat terkandung kata pemberdayaan (*empowering*) yaitu upaya untuk membuat masyarakat berdaya. Pemberdayaan menjadi prinsip utama dalam mengembangkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan adalah salah satu upaya untuk mencapai keberlanjutan setiap program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat. pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah dua konsep yang tidak bisa terpisahkan, yang setiap programnya berasal dari inisiatif masyarakat setempat dan mengoptimalkan kerja nyata masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah kearah yang lebih baik melalui upaya sendiri.

---

<sup>45</sup> Ayub M. Padangaran, Op.Cit, h. 31-32

<sup>46</sup> Ibid, h. 62

Aktivitas LSM dalam menangani kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat. Hal itu bisa dipahami karena kegiatan pengembangan masyarakat pada awalnya memang difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantitatif yang diindikasikan dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materiil. Namun hal tersebut direalisasikan dengan perubahan target kuantitatif ini sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terbedayakannya masyarakat.<sup>47</sup>

Menurut Baonewidjojo, menyimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya untuk mencapai enam tujuan yaitu (1) memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, (2) meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat, (3) meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan, (4) menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, (5) membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya, serta (6) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>48</sup>

Menurut Ite Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Zubaedi, Op.Cit. h. 72

<sup>48</sup> Ayub M. Padangaran, Op.Cit, h. 31

<sup>49</sup> Jim ife Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi :Community Development, terj. Sastrawan Manulang dkk.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 423

Sedangkan menurut Kartasasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>50</sup>

Maka dengan demikian yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola asset yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi.

#### **a. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa maca, strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat antara lain :

##### **a) *Direct Contact* ( bertatap muka langsung dengan sasaran)**

Metode ini adalah dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah. Metode ini dipandang dapat merangsang minat masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan mereka

---

<sup>50</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, ( Jakarta : Cides, 1996), h. 142

berfikir bahwa hal ini amat baik kalau mereka sendiri yang memikirkan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.

- b) *Demonstrasi Hasil* yaitu masyarakat mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-cara yang lama yang mereka kuasai.
- c) *Demonstrasi Proses* adalah memperlihatkan kepada orang lain bagaimana memperkembangkan sesuatu yang mereka kerjakan sekarang atau mengajarkan mereka menggunakan sesuatu alat baru.
- d) *Paksaan Sosial* adalah suatu strategi yang dengan cara-cara tertentu menciptakan suatu situasi yang terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>51</sup>

Selain strategi diatas, ada strategi pendekatan konservatif yang berupaya mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar dalam parameter konvensional. Adapun yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi konservatif adalah melalui :

*Pertama*, menarik industri. Pendekatan ini berupaya menemukan cara-cara baru yang membuat masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam ekonomi *mainstream* dengan cara menghimpun inisiatif. Pendekatan ini mencoba menarik industri baru ke wilayah lokal dengan memberikan lingkungan bagus untuk berinvestasi

---

<sup>51</sup>Supriyati Istiqamah, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandar Lampung : Fakultas Dakwah, 2008), h. 45

*Kedua*, memulai industry lokal. Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya lokal, bakat, minat dan keahlian serta penafsiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tertentu dan kemudian memutuskan apa jenis industry baru yang akan berhasil.

*Ketiga*, pariwisata. Mempromosikan pariwisata menjadi alternative yang menarik, pariwisata akan menjadi sumber daya yang potensial yang dapat mendatangkan penghasilan, dan juga sebagai industry bersih yang tidak menimbulkan polusi serta dapat mendukung terbukanya tenaga kerja.<sup>52</sup>

Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya.

Willy Wirasmita berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang berkarakter, yaitu: (1) mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan; (2) memaksimalkan penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian; (3) memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya; (4) menjadikan pembangunan terus berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan datang.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Jim Ife Frank Tesoriere, Op. Cit. h. 424-426

<sup>53</sup> Willy Wirasmita. 2014. Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan. (<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>). Diakses tanggal 12 April 2017).

## **b. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan jalan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk masyarakat memasuki dunia usaha. Adapun langkah-langkah tersebut adalah :<sup>54</sup>

- a. Pelatihan usaha, melalui pelatihan masyarakat diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep usaha dengan segala macam seluk beluk yang ada didalamnya dengan tujuan meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk serta perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dengan pengembangan jejaringan kemitraan.
- b. Pemagangan, dalam bidang usaha diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empiric.
- c. Penyusunan proposal, sebagai acuan dan target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal dapat memungkinkan terjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian
- d. Permodalan, yang merupakan salah satu factor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.
- e. Jaringan bisnis, sebagai upaya konsistensi, keberlanjutan usaha yang akan dilaksanakan.

---

<sup>54</sup> Totok Mardikanto, Loc. Cit. h. 225

## **B. Dasar Kebijakan Pemerintah tentang BUMDes**

### **1. Kedudukan BUMDes**

Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, adat istiadat masyarakat, dan sumber daya manusia yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>55</sup>

Gagalnya pembangunan yang orientasinya pembangunan Kota besar menjadikan masyarakat bawah semakin miskin dan termarginalkan. Bahkan lebih dari itu, dampak program pembangunan yang kurang efektif menangani permasalahan masyarakat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat kapitalis yang semakin membuat masyarakat tidak berdaya. Pasca Reformasi, program pembangunan mulai diperbaharui dengan menekankan pembangunan berbasis masyarakat, dimana desa menjadi sasaran utama yang harus dikembangkan karena desa merupakan roda kehidupan manusia dimulai. Banyak program yang dicanangkan pemerintah untuk memajukan desa, seperti Impres desa Tertinggal (IDT) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam

---

<sup>55</sup> UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

merealisasikan program pembangunan.

BUMDes hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Asset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 Bahwa Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dan pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa.<sup>56</sup>

Definisi BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>57</sup>

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>58</sup> BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social*

---

<sup>56</sup> UU No. 6 Tahun 2014, online terdapat di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 23 Mei 2017

<sup>57</sup> Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 35

<sup>58</sup> Ibid, h. 36



*institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.<sup>59</sup>

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>60</sup> Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan

---

<sup>59</sup> Sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

<sup>60</sup> Ibid. h. 4

kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Keberadaaan BUMDes di era otonomi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.<sup>61</sup>

Selanjutnya pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak

---

<sup>61</sup> Purnomo. 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.h. 17-18

menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).<sup>62</sup>

Pendirian BUMDes juga diiringi dengan program Pembangunan Desa yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi lampung yaitu program Gerakan Membangun Desa. Dalam Peraturan Gubernur Lampung No, 37 Tahun 2015 Gerbang Desa adalah program penanggulangan Kemiskinan yang bertumpu pada sinergisitas upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Adanya peraturan ini sangat membuktikan bahwa desa sangat diprioritaskan dalam pemerataan pembangunan daerah.

---

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

## **2. Implementasi Kebijakan BUMDes**

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah

dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Implementasi kebijakan pendirian BUMDes secara umum baru dilaksanakan 25% dilaksanakan oleh aparat desa, karena dalam pendirian BUMDes pengelolaan keuangan dana desa dan BUMDes belum efektif digunakan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan BUMDes kurang diutamakan.

### **3. Dasar Hukum Usaha Peningkatan Taraf Hidup**

Hidup sejahtera adalah impian setiap manusia, dan kebahagiaan adalah hak setiap manusia. Dalam islam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah ibadah. Oleh karena itu peningkatan pendapatan sangat diajarkan oleh agama sebagai upaya terhidar dari kemiskinan. Qs. Ar-Ra'd : 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya :“ *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.* ”

Ayat ini menjelaskan bahwa ada kewajiban tersendiri bagi kita untuk merubah keadaan hidup. Kita jangan lupa dengan Firman Allah di dalam surat Asysyura ayat 27...” *Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.*

Allah menganugerahkan kekayaan yang ada dimuka bumi untuk kita manfaatkan dalam memenuhi kebutuhan. Maka dari itu kita berkewajiban berusaha meningkatkan taraf hidup kita sebagai sarana ibadah kita kepada Allah. Ada sepenggal Hadis Rasulullah yang sangat populer oleh umat islam yakni *“Kemiskinan itu akan mendekatkan diri kepada kekufuran.”* Disini sangat jelas Allah membenci manusia yang tidak berusaha dalam hidupnya.

Berbicara tentang BUMDes , kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan badan yang memiliki wewenang sabagai penggerak ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola bersama masyarakat. Melalui upaya tersebut, kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dalam usaha dagang, pertanian, pariwisata, dan sebagainya. Keadaan ini sangat dianjurkan agama karena BUMDes telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦١﴾

Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Demikian juga BUMDes memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya . Sebagaimana firman Allah dala Surah At-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٢﴾

Artinya : “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia adalah subjek dari segala aspek kehidupannya. Untuk menjaga kesejahteraan dalam beriktikar Allah mengajurkan kita berbuat sesuatu yang bermanfaat member manfaat dan member motivasi

untuk meningkatkan kualitas kehidupan sebagai suatu upaya melaksanakan perintah Agama. Berikut dijelaskan kembali dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah,

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ  
اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ  
مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ  
كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا  
سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya :“ Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya, barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. ”(HR. Al-Bukhari No. 2442 dan Muslim No. 2580)

Sangat jelas bahwa dalam ayat ini, jika masyarakat melakukan *ikhtiyar*, maka Allah akan mempermudahnya. Dan Allah pasti akan berikan hasil sesuai dengan apa yang diusahakan oleh masyarakat. Dalam surat Ar-Ra'du Allah menegaskan kita untuk berbuat dan bertindak. Karena Allah hanya akan member kemudahan dan rejeki melimpah kepada orang-orang yang merubah keadaan mereka sendiri. Hal inipun dipertegas dalam Qs. An-Najm : 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾



Artinya : *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”*

Disinilah BUMDes memiliki peran penting sebagai usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Membantu masyarakat memobilisasi dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf kehidupan atau kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.

### **C. Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes**

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan.

Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.<sup>63</sup> Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan professional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Maka strategi pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa antara lain:<sup>64</sup>

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

---

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>64</sup> Purnomo. 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.h. 17-18

BUMDes memiliki tugas untuk meningkatkan pendapatan Desa dan memobilisasi potensi Desa melalui pembentukan Desa sebagai objek wisata. Dimana akan menjadi strategi dalam meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dengan memobilisasi potensi Desa dengan cara menjadikan Desa sebagai Desa wisata.

Desa wisata menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.<sup>65</sup>

Dewasa ini, pengalihan status Desa menjadi Desa wisata merupakan strategi alternatif dalam menggali serta memobilisasi potensi Desa agar bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun tujuan pengembangan Desa wisata, yaitu :

1. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternative
2. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata.
3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha penduduk
4. Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik
5. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk Desa untuk tetap tinggal di Desanya

---

<sup>65</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h. 67

6. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk pribumi
7. Memperkokoh persatuan bangsa, sehingga mengatasi disintergrasi.<sup>66</sup>

Pengembangan Desa Wisata perlu kerja kolektifitas antara pemerintah Desa, Stakeholder dan masyarakat setempat. Langkah-langkah strategis untuk mengembangkan potensi Desa menjadi Desa Wisata yaitu :<sup>67</sup>

1. Identifikasi peotensi Desa melalui rembug bersama seluruh komponen desa dari semua kalangan
2. Identifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan potensi wisata Desa
3. Perlunya komitmen kuat dari seluruh komponen desa untuk menyamakan pendapat, persepsi dalam mengangkat potensi Desa
4. Identifikasi dampak positif maupun negatif dari sebuah kegiatan wisata sesuai kekhasan masing-masing Desa
5. Komitmen yang kuat dari seluruh komponen Desa untuk menggandeng pemerintah daerah dan jika perlu menggandeng pihak swasta
6. Menyiapkan segala perangkat-perangkat yang bertujuan untuk mengawal pengembangan potensi Desa
7. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen Desa
8. Gunakan segala media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata desa

---

<sup>66</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, Ibid, h. 69

<sup>67</sup> Online Terdapat di [Puslitabmas.stbi.ac.id](http://Puslitabmas.stbi.ac.id), diakses pada tanggal 7 Mei 2017

#### 9. Belajar pada kesuksesan desa wisata lain.

Strategi di atas menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi perdesaan, terutama dalam hal penanganan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Desa. Penting untuk diimplementasikan sebagai sebuah pola peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Berkaitan dengan persoalan ekonomi perdesaan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan perdesaan. Namun demikian, strategi penyelesaian persoalan ekonomi perdesaan tidak cukup, masih dibutuhkan sebuah konsep pembangunan ekonomi perdesaan menjadi lebih baik, antara lain sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi Desa, pertanian berkelanjutan, Peternakan berbasis diversifikasi produk, Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pengembangan Agroindustri.



# **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA HANURA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT**

### **A. Gambaran Umum Desa Hanura**

#### **1. Sejarah Singkat Kepemimpinan**

Transmigrasi Angkatan Darat merupakan gagasan luhur Bapak Jendral Ahmad Yani Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu, sebagai bentuk pengejawantahan akar bangun prajurit TNI Angkatan Darat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat dan kembali kerakyat, dan pengejawantahan dari pola Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA). Gagasan luhur tersebut yang memberikan peluang kesejahteraan anggota TNI Angkatan Darat beserta keluarganya setelah mencapai bebas tugas dan pensiun.

Pada tahun 1996, sebagai akibat dari peremajaan dilingkungan TNI-AD, maka segala kemampuan dana dan daya yang ada pada Angkatan Darat, lahirlah proyek Trans-AD yang kedua yaitu HANURA. Trans-AD Hanura merupakan proyek Transmigrasi Angkatan Darat ke-2 di Provinsi Lampung setelah proyek Transmigrasi Angkatan Darat I di Ponocito Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah.

Proyek Transmigrasi Angkatan Darat ke-2 di Provinsi Lampung dibuka secara resmi oleh Mayor Jendral Alamsyah Ratu Prawira Negara selaku Assisten

VII KASAD mewakili Pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 17 September 1966. Kemudian Proyek Transmigrasi Angkatan Darat ke-2 di Provinsi Lampung di beri nama Hanura yang merupakan kepanjangan dari “Hati Nurani Rakyat”. Pemberian nama tersebut dimaksudkan agar Proyek Transmigrasi Angkatan Darat ke-2 di Provinsi Lampung merupakan pencerminan keinginan para transmigran dan merupakan pencerminan kembali TNI ditengah-tengah masyarakat. Meskipun Proyek Trans-AD II Hanura dibuka pada tanggal 17 september 1966, namun pemberangkatan keluarga transmigran baru dituntaskan pada Bulan April 1967. Lokasi proyek berada di titik antara KM 12 14 Jalan Raya Teluk Betung-Padang Cermin.luas proyek 600 Ha dengan pembagian area sebagai berikut :

- a. Pekarangan keluarga transmigra seluas : 117,75 Ha
- b. Perladangan/ perkebunan : 196,25 Ha
- c. Area Publik, Kav Guru dan area cadangan : 286,00 Ha

Seluruh dan batas-batas Desa telah dipasang patok-patok oleh Dit. Agraria. Mengenai fasilitas publik, Proyek Trans-AD II Hanura menyediakan fasilitas pendidikan, lembaga perekonomian yang telah memiliki KUD yang telah berbadan hukum.

Selama pembinaan dan tanggung jawab Koordinator Pelaksanaan Lapangan, maka secara resmi dibentuklah Pemerintahan Desa Trans-AD II Hanura. Sebagai kepala pemeritaha pertama, ditunjuklah Mayor Mariyo dengan mempertimbangkan umur dan pangkat yang tertinggi kala itu. Mengingat usia dan kemampuannya telah menuru maka pada tahun 1967 digantikan oleh Kapten Willian Corne sampai

tahun 1969. Pada tahun ini adalah proses awal demokrasi dalam suksesi kepemimpinan Desa, pemilihan kepala Desa Trans-AD Hanura dilaksanakan. Sebagai kepala Desa terpilih yaitu Kopral Satu Tugio. Namun dalam perjalanan memimpin desa, yaitu pada tahun 1971 Bapak Tugio meninggal Dunia. untuk melanjutkan roda kepemimpinan diteruskan oleh bapak pembantu Letnan satu sansarkadi sampai tahun 1972. Roda kepemimpinan terus berlanjut hingga saat ini yang menjadikan Desa Hanura semakin maju.<sup>68</sup>

Tabel 1 : Urutan Jabatan Kepala Desa Hanura

No.	Nama Kepala Desa	Tahun
1.	Mayor Mario	1966-1967
2.	Kapten Willian Corne	1967-1969
3.	Kopral satu Tugio	1969-1971
4.	Letnan I Sankardi	1971-1972
5.	Sersan Mayor Sularno	1972-1977
6.	Letnan satu Enan Setiayadi	1977-1978
7.	Sersan Mayor Supardi	1978-1980
8.	Letnan dua M.Gunung	1980-1990
9.	Sukarsono	1990-1993
10.	Badril Amiril	1993-1995
11.	Suroto	1995-2005
12.	Samino	2005-2011
13.	Chodri Cahyadi	2011-sekarang

Sumber : Monografi Desa Hanura

## 2. Monografi Desa Hanuura

### a. Letak Geografis

---

<sup>68</sup> Profil Desa Hanura Tahun 2006



Desa Hanura merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Teluk Pandan. Desa Hanura terletak pada 25 pada ketinggian rata-rata 10 M. Secara geografis Desa Hanura, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

a) Darai permukaan laut (DPL), dengan batas-batas Desa sebagai berikut :

1. Utara : Desa Hurun
2. Timur : Pesisir Laut Teluk Pandan
3. Selatan : Desa Sisodadi
4. Barat : Desa Cilimus

b) Iklim

1. Curah Hujan : 2000-3000 Mm
2. Jumlah hujan bulan : 6 Bulan
3. Suhu rata-rata harian : 25-30 C0
4. Bentang Wilayah : Datar/Bukit/Pegunungan

c) Luas Wilayah 600 Ha, dengan jenis Tanah

1. Pekarangan : 179 Ha
2. Perkebunan : 200 Ha
3. Hutan Desa : 93 Ha
4. Sawah : 34 Ha
5. Pesisir : 50 Ha
6. Kolam : 10 Ha
7. Area publik : 22 Ha

d). Orbitrasi Desa Hanura

1. Jarak dari pusat Pemerintahan ke Kecamatan: 1 Km
2. Jarak dari pusat Pemerintahan ke Kabupaten : 65 Km
3. Jarak dari pusat Pemerintahan ke Provinsi : 13 Km
4. Jarak dari pusat Pemerintahan ke Pusat : 360 Km

**b. Kondisi Demografis Desa Hanura**

Berdasarkan pemutahiran data pada Bulan Juni 2016, Desa Hanura mempunyai jumlah penduduk 6,641 Jiwa, terdiri dari 3.248 jiwa laki-laki dan 3.343 jiwa perempuan yang tersebar di 34 Rt dan 4 Dusun yang ada di Desa Hanura dengan perincian sebagaimana pada table berikut ini :

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga

Nama RW	Nama Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
RW. 01	Dusun A	127	264	271	535
RW. 02	Dusun A	132	232	238	470
RW. 03	Dusun A	148	269	278	547
RW. 01	Dusun B	274	551	573	1124
RW. 02	Dusun B	232	424	450	874
RW. 01	Dusun C	236	456	472	928
RW. 02	Dusun C	174	379	369	748
RW. 03	Dusun C	84	159	164	323
RW. 01	Dusun D	136	304	314	618
RW. 02	Dusun D	93	211	213	424

Sumber : Monografi Desa Hanura

Desa Hanura memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, daftar menurut usia pada tahun 2016 adalah usia 0-4 tahun berjumlah 297 jiwa, 5-6 tahun berjumlah 187 jiwa, 7-12 tahun 991 jiwa, 13-15 tahun berjumlah 417 jiwa, 16-18

tahun berjumlah 469 tahun, 19-25 tahun berjumlah 935 jiwa dan 26-64 tahun berjumlah 2912 jiwa.

Adapun table jumlah penduduk Desa Hanura berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Umur	0-4	5-6	7-12	13-15	16-18	19-25	26-64	65-	Total
Jumlah	297	187	991	417	469	935	2912	438	6641

Sumber : Monografi Desa Hanura

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Desa Hanura yaitu 6,641 Jiwa memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Mayoritas pendidikan masyarakat Hanura rata-rata hanya lulus SD. Kemudian lulus SMP 1248 Jiwa, lulusan SMA 1119 jiwa, lulusan SI 123 jiwa, dan lulusan S2 11 jiwa. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut in :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S2	11
SI	211
D3	123
DI/D2	96
SLTA	1119
SLTP	1248
SD	1929

Tamat SD	1448
Belum Sekolah	477
Total	6641

Sumber : Monografi Desa Hanura

### c. Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Hanura

Berdasarkan hasil observasi termasuk dengan melakukan interview terhadap Tokoh masyarakat setempat, Desa Hanura mayoritas dihuni oleh penduduk beragama islam. Adapun gambaran kondisi sosial dan keagamaan masyarakat desa Hanura adalah sebagai berikut :

#### 1. Derajat Kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kegiatan pelayanan untuk pemeriksaan dan pengobatan, serta sesekali melakukan kunjungan di rumah-rumah warga. Desa Hanura juga sudah memiliki Puskesmas sendiri, keberadaannya sangat dekat dan strategis, untuk itu sangat mudah di akses masyarakat. Selain puskesmas, jug ada 2 Poliklinik dan bidan Desa yang memberikan pelayanan kesehatan kepada warga, dan jug adanya Posyandu di tiap-tiap Dusun Hanura yang membantu dalam Pelayanan warga terkait dengan masalah kesehatan.

#### 2. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat Desa Hanura adalah pengajian. Pengajian dilaksanakan setiap malam jum'at setelah shalat isya. Dalam pengajian tersebut, terdapat beberapa rangkaian acara, diantaranya Shalawat, Tawassul, siaraman Rohani dan juga ada penggalangan dana untuk Anak-anak yatim. Kegiatan rutin ini tidak hanya sebagai bentuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. tetapi dengan kegiatan pengajian dapat meningkatkan tali silaturahmi antar warga. Masyarakat juga sering mengadakan acara pengajian untuk memperingati Hari Besar Islam setiap tahunnya dan mengundang ibu-ibu majlis lainnya.<sup>69</sup>

Kegiatan seni yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hanura yaitu :

- a. Group Qasidah : 6 Group
- b. Kuda Lumping : 1 Group
- c. Pencak Silat : 1 Group
- d. Campur Sari/Jawa : 1 Group
- e. Organ Tunggal : 2 Group

Masyarakat Desa Hanura merupakan masyarakat majemuk yang berasal dari berbagai suku baik Sunda, Jawa, dan Lampung. Meskipun beragam suku, dan agama, masyarakat Desa Hanura sangat toleransi dan tenggang rasa antar sesama.

Tabel 5. Jumlah Umat Beragama Desa Hanura

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	5.993 Jiwa
2.	Kristen	511 Jiwa

---

<sup>69</sup> Abdul Rohim, PPN, Wawancara 17 Juli 2017

3.	Hindu	350 Jiwa
4.	Budha	213 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Hanura 2016

### 3. Gotong Royong

Gotong royong merupakan himbauan seluruh Rukun Tetangga (RT) guna melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan yang dimulai pukul 8 pagi hingga 11 siang. Selain meningkatkan kebersamaan antara masyarakat di Desa Hanura, masyarakat juga antisipasi terhadap banjir, masyarakat beramai-ramai membersihkan selokan ang ada diinggir jalan dan membersihkan jalan yang berserakan. Diadakannya kegiatan rutin gotong royong pada hari minggu supaya terindar dari wabah penyakit.<sup>70</sup> Kondisi sarana prasarana Desa secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Prasarana Desa yang dimiliki Desa Hanura

No.	Prasarana umum	Jumlah
1.	Masjid Jami	3 Buah
2.	TPQ	3 Buah
3.	Mushola	17 Buah
4.	Gereja	3 Buah
5.	Puskesmas	1 Buah
6.	Pasar	1 Buah

Sumber : Monografi Desa Hanura

#### d. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Hanura

Karena Desa Hanura merupakan desa pertanian. Maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dikebun dan disawah.

Selengkapnya dalam tabel berikut ini :

---

<sup>70</sup> Sudarto, Kadus A, Wawancara 17 Juli 2017

Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Hanura

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pensiunan	117 Orang
2.	PNS	342 Orang
3.	TNI-Polri	111 Orang
4.	Petani	467 Orang
5.	Buruh	314 Orang
6.	Peg.Swasta	158 Orang
7.	Lain-lain	127 Orang

Sumber : Monografi Desa Hanura

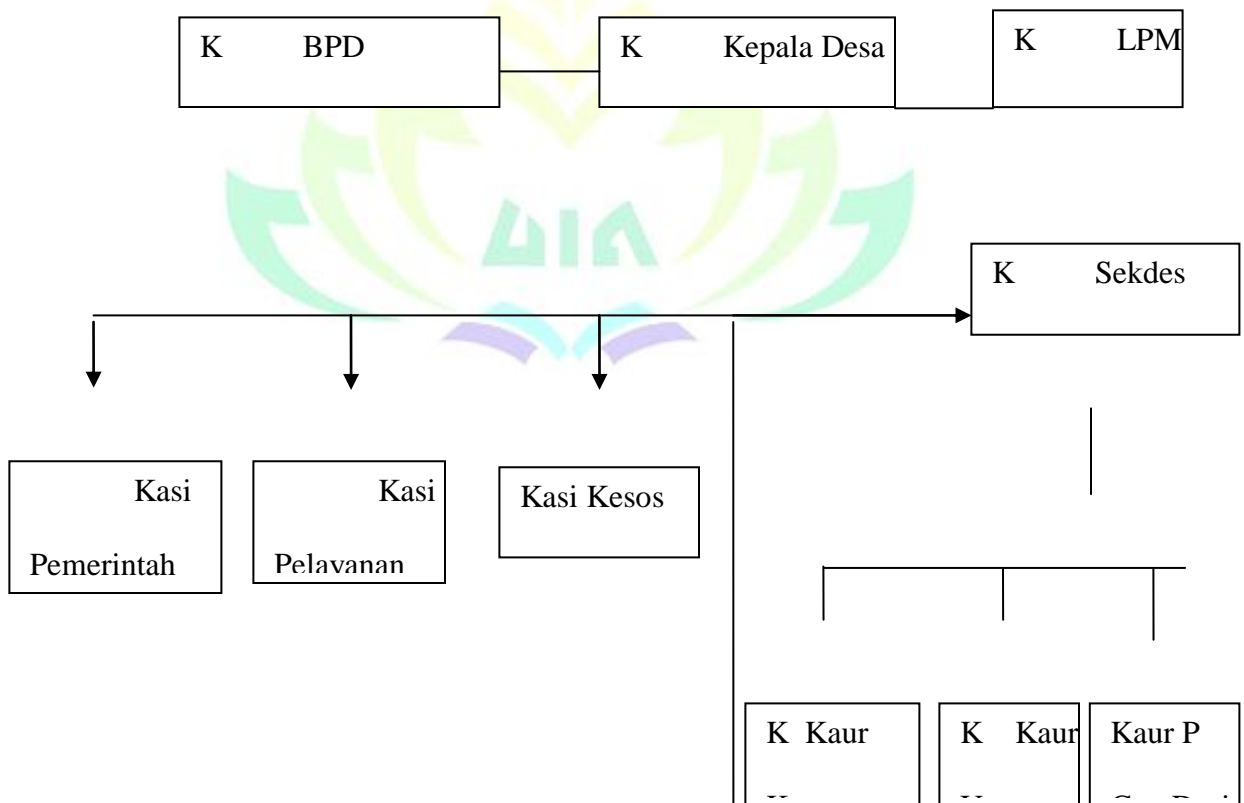
Keberadaan pasar Ampara yang ada di Desa Hanura merupakan asset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa Hanura. Selain mayoritas penduduk sebagai petani, di Desa Hanura banyak tumbuh usaha-usaha seperti perdagangan, jasa, warung, pengrajin kayu, kelontong, toko, dan juga *Home Industry* serta perikanan dan ternak rumahan. Kemampuan keuangan desa asih mengandalkan bantuan dari Pemerintah, sementara untuk pendapatan asli desa dari Salar Pasar dan bantuan pihak ketiga masih relative kurang untuk biaya pembangunan Desa.

Dengan banyaknya alat Telekomunikasi yang ada seperti Telepon genggam (HP), akses internet membuat komunikasi lancar dan mudah. disamping itu hampir semua keluarga telah memiliki sarana TV, Radio, bahkan Smartphone dan computer menjadikan pengetahuan dan perkembangan Informasi dan Teknologi semakin cepat.

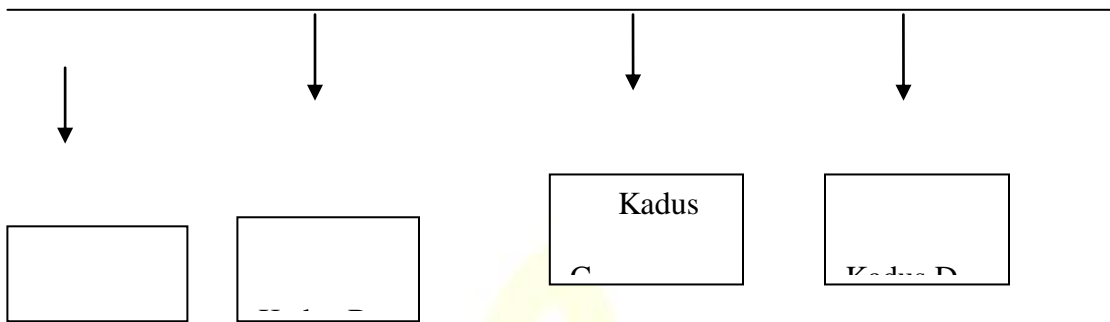
Untuk saat ini Desa Hanura telah memiliki media informasi yang bisa diakses melalui internet, yaitu berupa Website Desa dengan alamat

<http://hanura.desa.id> yang sudah memfungsikan Surat Elektronik (Email) sebagai saran koresponden dan menyampaikan informasi dan aspirasi dengan alamat : desahanuragmail.com yang terintegrasi dengan sosial media berupa Twitter maupun Facebook Desa Hanura. Berikut ini Struktur pemerintahan Desa Hanura :

#### Struktur Organisasi Pemerintah







## **B. Gambaran Umum BUMDes Hati Nurani**

### **1. Organisasi**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Desa Hanura telah membuat Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tugas dan tanggungjawab Badan Pengurus dan Pengelola melaksanakan kegiatan Usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha milik Desa dan melaporkan kemajuan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Hanura. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 24 April 2015.<sup>71</sup>

### **2. Tujuan pembentukan BUMDes yaitu :**

- a. Meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) Desa Hanura dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa Hanura dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat

---

<sup>71</sup> Dokumentasi, Database Pendirian BUMDes Hati Nurani

- b. Pengembangan potensi perekonomian di Wilayah Desa Hanura untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Desa Hanura secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan
- c. Menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jaminan sosial

### 3. Struktur Kepengurusan

Tabel. 7 Kepengurusan BUMDes Hati Nurani

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Chodri cahyadi	Kepala Desa	Komisaris
2.	Zikri septiawan	Masyarakat	Ketua
3.	Deshita	Kaur Umum Desa	Sekretaris
4.	Eka Damayanti	Masyarakat	Bendahara
5.	Hajuli	Masyarakat	Koordinator Unit Usaha pengelolaan Pasar
6.	Herman	Masyarakat	Koordinator Unit Usaha Rumah Tangga

Sumber : Database BUMDes Desa Hanura

4. Jenis Usaha BUMDes meliputi usaha-usaha bidang antara lain :
  - a. Jasa loket dan lembaga keuangan mikro
  - b. Jasa Pengelolaan Sampah
  - c. Jasa Renting dan Traveling
  - d. Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi/Pasar Desa
  - e. Industri Rumah Tangga/UEP/PIRT
  - f. Pengelolaan Air Bersih

g. Pengadaan Sembako dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan.<sup>72</sup>

### **C. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes**

#### **1. Pengelolaan BUMDes dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat**

BUMDes merupakan Badan Usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Chodri selaku Kepala Desa Hanura mengatakan bahwa BUMDes wajib ada di setiap Desa, seperti dalam peraturan Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Maka berdasarkan UU tersebut, berdirinya BUMDes Hati Nurani yang dibentuk sejak tahun 2015 mampu menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.<sup>73</sup>

Meskipun BUMDes terpisah dari struktur formal pemerintahan desa, BUMDes tidak berdiri secara Eksklusif. Kebijakan pendirian BUMDes harus melalui peraturan desa, yang disiapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Karena itu dalam konteks ini, BPD berwenang melakukan pengawasan umum terhadap

---

<sup>72</sup> Dokumentasi, Database Pendirian BUMDes Hati Nurani

<sup>73</sup> Chodri Cahyadi, Kepala Desa, Wawancara 25 Juli 2017

BUMDes untuk menjaga agar BUMDes berjalan secara bertanggung jawab.<sup>74</sup>

Bapak Zikri selaku Ketua BUMDesa juga menerangkan bahwa kelembagaan BUMDes bersifat unik. BUMDes bukan sebagai usaha murni pemerintah, bukan usaha bersama masyarakat, bukan usaha swasta, dan bukan pula sebagai bentuk *public and private Partnership*. Bapak Zikri juga menambahkan bahwa prinsip dasarnya BUMDes bukanlah proyek pemerintah di desa tetapi sebagai bentuk prakarsa dan gerakan desa. Berdirinya BUMDes di Desa Hanura sangat membantu pendapatan Desa, karena lewat BUMDes, pengelolaan potensi Desa dapat termobilisasi dengan baik. Seperti adanya potensi air terjun yang bisa dikembangkan sebagai usaha BUMDes dalam meningkatkan usaha masyarakat.<sup>75</sup>

Pendanaan Desa dengan BUMDes itu terpisah, sehingga dalam pengelolaan BUMDes berdiri sendiri, namun masih dalam naungan pemerintah Desa. Terbentuknya BUMDes diharapkan sebagai upaya menjadikan Desa Hanura sebagai Desa mandiri secara financial, sehingga dapat membantu permodalan usaha masyarakat. Secara pengelolaan, BUMDes berdiri sendiri, namun pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk kedalam dana Desa yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMDes menjadi sebagai wadah badan usaha yang menaungi usaha kecil masyarakat agar lebih optimal pemasarannya.

---

<sup>74</sup>Agus, Wawancara 17 Juli 2017

<sup>75</sup> Zikri Setiawan, Wawancara 25 Juli 2017

Hal tersebut juga di tegaskan kembali oleh Bapak Herman :

BUMDes Hati Nurani memiliki usaha toko sembako yang menyediakan kebutuhan masyarakat. Kami menerima dan menampung produk dari masyarakat seperti kripik tempe, pisang dan sebagainya. Yang kemudian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Melalui unit usaha ini membantu masyarakat menyalurkan produk usaha masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga khususnya.<sup>76</sup>

Ibu Anggun menjelaskan bahwa, usaha kripik Tempe yang ia jalani hampir 2 tahun terakhir ini mengalami kemajuan produksi. Karena usahanya secara pemasaran kurang, dengan adanya BUMDes member kesempatan usahanya berkembang dengan baik. Meskipun sedikit pemasukannya, namun ia sangat mendukung adanya BUMDes ini.<sup>77</sup>

BUMDes Desa Hanura dalam pengelolaannya juga langsung dilakukan oleh masyarakat setempat. Unit usaha yang di kelola oleh BUMDes yang memberikan masukan terbesar dalam keuangan Desa yaitu :

a. Pengelolaan Pasar

a) Sampah

Desa Hanura merupakan Desa yang terbilang cukup maju di antara Desa di Kecamatan Teluk Pandan. Adanya pasar Tradisional menjadikan pusat kegiatan

---

<sup>76</sup> Herman, Wawancara 20 Juli 2017

<sup>77</sup> Anggun, Wawancara 22 Juli 2017

ekonomi masyarakat maju. Dengan adanya pasar, maka unit usaha yang memberi kontribusi besar berada dipasar. Pasar Ampera menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Desa Hanura.

Unit usaha pengelolaan BUMDes yang ditujukan untuk wilayah pasar memberi kontribusi terbesar terhadap pemasukan anggaran Desa. Dimana pengelolaan sampah ini setiap harinya memberi masukan sebesar 300 ribu setiap harinya. Seperti yang diungkapkan Eka Damayanti Bendahara BUMDes adanya unit usaha pengelolaan sampah bukan hanya memberi kemudahan membuang sampah, namun juga memberi pekerjaan baru kepada masyarakat. Uang pengelolaan sampah itu masuk kedalam dana Desa.

#### b) Pengelolaan Parkir

Unit usaha kedua yang masih berasal dari pasar adalah pengelolaan parkir. Berdasarkan observasi, pengelolaan parkir yang baik menjadikan kondisi pasar tertib dan aman. Dari parkir setiap harinya hampir 500 ribu. Seperti yang diungkapkan seperti yang diungkapkan Bapak Hajuli bahwa:

Unit usaha pengelolaan pasar baik parkir maupun sampah ini, memang sangat member masukan terbesar kepada Desa. Oleh sebab itu, pengelolaan unit usaha pasar harus dilakukan secara baik agar tetap berlanjut, sehingga membantu keuangan Desa yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Hajuli, Wawancara 20 Juli 2017

Dengan adanya pengelolaan parkir yang baik, kegiatan pasar terkendali. Masyarakat aman dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Lewat parkir, remaja yang tidak memiliki pekerjaan, mendapat masukan tambahan untuk keluarganya. Hampir 80% pendapatan Desa itu berasal dari pasar.

Hendra juga mengatakan bahwa dengan ia menjaga Parkir setiap seminggu 2 kali membantu keuangannya untuk keperluan sekolah. Melalui parkir ini juga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### b. Unit Produk dan Jasa

Unit usaha produk dan jasa yang di dirikan oleh BUMDes dibagi menjadi dua yaitu simpanan dan pembiayaan.

Berdasarkan hasil interview, bentuk simpanan yang ada yaitu tabungan masyarakat Hanura dan tabungan usaha mikro. Tabungan ini di adakan dengan tujuan untuk memberi dukungan kepada masyarakat dalam meningkatkan usahanya agar tidak kehabisan modal, serta membantu masyarakat untuk menabung untuk kebutuhan mendatang, seperti kebutuhan sekolah. Kedua bentuk tabungan tersebut dikelola oleh BUMDes dengan cara memutar kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya tabungan membantu masyarakat tidak kesulitan mendapatkan modal.<sup>79</sup>

Hal diatas juga ditegaskan oleh Ibu Anggun bahwa :

Melalui simpanan tersebut, saya tidak kesulitan mencari modal lagi dan karena selain bisa menambah modal, saya juga bisa menabung. Sehingga usahanya

---

<sup>79</sup> Eka Damayanti, Wawancara 25 Juli 2017



bisa di control dengan baik pemasukannya. Dengan masyarakat menabung, masyarakat disini yang punya usaha jug terbantu dengan meminjam modal dari tabungan tersebut, yang memang sudah disepakati bersama.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil interview dan observasi juga, masyarakat banyak tertarik dengan unit produk dan jasa simpan pinjam in. selain membantu masyarakat untuk menabung, jug membantu masyarakat yang memiliki tekad memulai usaha.

#### c. Unit Sektor Riil

Bentuk usaha sektor riil yang dikembangkan oleh BUMDes Desa Hanura adalah pengadaan kebutuhan masyarakat sehari-hari yaitu sembako. Toko sembako ini di buka di kantor kelurahan. Toko sembako ini juga merupakan tempat penitipan produk masyarakat seperti keripik, kerajinan dan sebagainya. Berdasarkan hasil observasi, toko sembako ini sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Banyak masyarakat juga yang belanja di toko sembako BUMDes.<sup>81</sup>

Selain toko sembako, unit usaha sektorial riil BUMDes lainnya yaitu pengadaan barang dan jasa seperti loket pembayaran listrik, air, telepon, jasa konstruksi dan lainnya. Dari beragam unit usaha tersebut, Bapak Hajuli di pegang langsung oleh masyarakat. Karyawan yang menjaga loket pemuda yang tidak sekolah lagi, sehingga membantu membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dengan adanya pengadaan barang dan jasa tersebut, masyarakat semakin mudah

---

<sup>80</sup> Anggun, Wawancara 27 Juli 2017

<sup>81</sup> Observasi, 20 Juli 2017

dan tidak ribet harus keluar desa. Malahan dengan adanya pengadaan barang dan jasa tersebut, banyak masyarakat dari luar Desa Hanura yang datang ke loket Desa Hanura tersebut.<sup>82</sup>

#### d. Industri Rumah Tangga

Berdasarkan hasil observasi, ibu-ibu masyarakat Desa Hanura selain hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, mereka juga memiliki pekerjaan sampingan seperti bekerja di pasar, membuka usaha kelontongan, ada beberapa kelompok masyarakat memiliki usaha produktif rumah tangga yang sampai sekarang masih berjalan dan berkembang. Usaha industry rumah tangga ini mampu menambah pendapatan tambahan, membuat masyarakat mandiri, juga menjadi khas atau oleh-oleh Desa Hanura.<sup>83</sup>

Bapak Herman selaku koordinator unit usaha rumah tangga BUMDes Desa Hanura menerangkan bahwa unit usaha rumah tangga yang dikelola oleh BUMDes merupakan usaha membantu masyarakat untuk memasarkan produk masyarakat agar bisa terjual. Unit usaha rumah tangga ini juga bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Hanura yang kegiatannya memberdayakan Ibu Rumah Tangga.<sup>84</sup>

Ibu Herlina salah satu pegurus KWT menerangkan :

Manfaat adanya BUMDes membantu memasarkan produk yang kita miliki, selama ini produk kita hanya bisa dinikmati oleh anggota KWT saja, tapi

---

<sup>82</sup> Hajuli, wawancara 20 Juli 2017

<sup>83</sup> Observasi, 17 Juli 2017

<sup>84</sup> Herman, Wawancara 20 Juli 2017

setelah adanya BUMDes, produk kami diproduksi lebih banyak, dan itu bisa membantu meningkatkan pendapatan ibu-ibu disini yang tergabung dengan KWT.<sup>85</sup>

Adapun bentuk Produk rumah tangga Desa Hanura, yaitu :

1) Produk Aneka Kripik

Desa Hanura merupakan Desa yang memiliki hasil bumi yang melimpah, seperti pisang, singkong, dan sebagainya. Banyaknya hasil kebun tersebut, masyarakat khususnya Ibu-ibu memanfaatkan untuk menambah pendapatannya. Produk Kripik yang menjadi khas oleh-oleh Desa Hanura adalah keripik sagu tempe.

2) Produk Belimbing Wuluh

Produk belimbing wuluh yang diproduksi oleh masyarakat Desa Hanura berupa sirup belimbing wuluh. Sirup ini sudah masuk kedalam oleh-oleh khas Lampung.

Ibu Anggun mengatakan bahwa Ibu-ibu masyarakat Desa Hanura mendapat ilmu pada saat mendapat pelatihan dari kelompok Watala. Sirup belimbing wuluh diproduksi tidak setiap hari, namun diproduksi sesuai kebutuhan saja. Masyarakat disini setiap rumah khususnya wilayah D di beri modal bibit belimbing wuluh untuk ditanam dipekarangan rumah atau dikebun. Dengan begitu bahan baku sirup dibeli dari masyarakat, sehingga ini juga membantu perekonomian masyarakat setempat.

---

<sup>85</sup> Herlina, Wawancara 20 Juli 2017

Dari berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes, dana penghilan dari setiap unit usaha tersebut masuk dalam dana desa. Dana yang masuk kedalam desa tersebut di gunakan untuk pembangunan desa baik infrastruktur desa, pengadaan barang renting yang dibutuhkan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

## **2. Kegiatan Usaha BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Usaha-usaha dalam pendapatan ekonomi masyarakat Desa Hanura Melalui BUMDes dilakukan melalui beragam kegiatan adalah sebuah upaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan-pelatihan dilakukan sebagai penunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Desa Hanura yang mandiri, kreatif, kompotitif, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Usaha peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Beberapa usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program BUMDes, yaitu :

### **a. Penyuluhan**

Kegiatan penyuluhan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Hati Nurani adalah untuk memberikan informasi mengenai berdirinya BUMDes. Kegiatan penyuluhan ini juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi unit usaha yang akan dikembangkan di Desa Hanura kepada masyarakat, agar masyarakat ikut serta merealisasikan unit usaha tersebut.

Bapak Dzikri mengatakan bahwa penyuluhan ini dilakukan agar unit usaha yang di bentuk sesuai kebutuhan masyarakat yang bisa membantu mengembangkan ekonomi masyarakat.<sup>86</sup>

b. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusi masyarakat Desa Hanura. Melalui pelatihan kemampuan secara *hard skill* dan *soft skill* masyarakat akan terlatih, sehingga menjadikan masyarakat yang terampil, mandiri, dan kreatif. Dalam hal ini, kegiatan pelatihan seperti pelatihan pembuatan kerajinanana, pelatihan tataboga dan sebagainya dilakukan dengan cara bekerjasama dengan organisasi masyarakat seperti Kelompok Wanita Tani, SKH, dan Watala.

Ibu Anggun mengatakan bahwa, dengan adanya pelatihan mampu meningkatkan keterampilan ibu-ibu rumah tangga untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan dengan cara membuka usaha dari hasil kegiatan pelatihan tersebut.<sup>87</sup>

Berdasarkan data kegiatan Desa, pelatihan kewirausahaan dilakukan pada bulan Februari 2016. Sampai pada akhir tahun 2016 kegiatan ini sudah 3 kali dilakukan. Kegiatan ini di ikuti sebanyak 24 orang secara umum. Pelatihan ini dibimbing dan di bina oleh pelatih dari local maupun dari luar Kota yang sudah bekerjasama dengan pihak Watala, Kawan Tani, KWT, dan lainnya. Awal

---

<sup>86</sup> Dzikri, Wawancara 25 Juli 2017

<sup>87</sup> Anggun, Wawancara 27 Juli

kegiatan ini adalah dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan kewirausahaan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya masyarakat diberikan pelatihan pengembangan skill masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti dengan menghasilkan produk kerajinan, keripik-kripik dan sebagainya. Tahap terakhir kegiatan ini adalah memberikan edukasi masyarakat mengenai pemasaran produk yang baik. Kegiatan ini lebih mengoptimalkan praktek masyarakat sehingga masyarakat mudah mengaplikasikannya untuk dapat di jadikan pengembangan usaha masyarakat setempat.<sup>88</sup>

#### c. Peminjaman Modal

Cara pengembangan usaha dan pengelolaan dana pinjaman untuk masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes adalah dana dari Desa yang merupakan hasil dana terkumpul dari setiap unit usaha yang dibuka oleh BUMDes. Masyarakat di beri pinjaman sesuai dengan bentuk usaha yang dimilikinya, kemudian ada juga Modal dari BUMDes, produk masyarakat yang buat, maka hasilnya dibagi dua.

---

<sup>88</sup> Dokumentasi Database BUMDES 2016

#### **D. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengembangan Ekonomi**

Indicator keberhasilan BUMDes Hati Nurani dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang dimulai sejak tahun 2015 adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah aktor utama dalam meningkatkan menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian Desa. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes meliputi :

##### **a. Perencanaan**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan di mulai pada tahap keikutsertaan masyarakat dalam membentuk BUMDes sebagai badan otonom Desa yang memiliki wewenang memobilisasi kegiatan usaha masyarakat. Partisipasi masyarakat selanjutnya dalam perencanaan adalah kehadiran masyarakat dalam sosialisasi dan perencanaan kegiatan BUMDes. Berdasarkan hasil observasi 18 Juli 2017, masyarakat mendukung dan merespon dengan baik berdirinya BUMDes.

Seperti yang dikatakan Bapak Paijo, menurutnya dalam proses pendirian dan perencanaan kegiatan BUMDes masyarakat dilibatkan untuk ikut serta dalam rapat pembentukan yang dilakukan di balai Desa. Dalam sosialisasi untuk perencanaan unit usaha yang akan dikelola BUMDes masyarakat dilibatkan baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang memang mereka memiliki peran dalam

kegiatan ekonomi.<sup>89</sup> Pernyataan Bapak Paijo itu juga diperjelas oleh Bapak Zikri bahwa BUMDes kan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, kalo masyarakatnya kurang peduli tidak akan terlaksana. Pada awal pembentukan masyarakat sangat antusias mendukung sekali, sampai sekarang jug sangat mendukung. Unit usaha yang sudah dikelola dengan baik oleh BUMDes itu juga merupakan hasil musyawarah bersama masyarakat, karena memang dengan adanya pasar kegiatan ekonomi masyarakat harus dikontrol dengan baik.<sup>90</sup>

Namun pada sisi lain, dari hasil observasi dan Interview, penulis menemukan perbedaan pendapat dari beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah Kadus D, dimana masyarakat kurang faham mengetahui keberadaan BUMDes Hati Nurani itu sendiri. Bapak Suparno menjelaskan bahwa ia selaku Kepala Wilayah D kurang faham mengetahui BUMDes karena memang waktu sosialisasi dan perencanaan berdirinya BUMDes tidak mengetahui, dan ia mengetahui setelah terbentuk. Menurutnya itu dikarenakan kurang komunikasi Kepada Desa dengan masyarakat wialayah Dusun D, karena memang jauh dari wilayah Pusat Desa Hanura.<sup>91</sup>

#### b. Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan dilakukan setelah dilakukannya perencanaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Seperti masyarakat menitipkan hasil

---

<sup>89</sup> Supaijo, Wawancara 22 Juli 2017

<sup>90</sup> Suparno, Wawancara 22 Juli 2017

<sup>91</sup> Kepala Wilayah D



produksinya kepada BUMDes itu sudah termasuk bentuk partisipasi membantu merealisasikan BUMDes.

Hal itu ditunjang oleh pendapat salah seorang sekretaris Desa Bapak Agus Guntoro, menurutnya pelaksanaan dilakukan setelah selesai perencanaan dan kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang diabntu oleh pengurus BUMDes. Masyarakat ikut dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh BUMDes yang tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat. Menurut nya juga, setelah masyarakat bisa memiliki skill baik itu makanan, kerajinan, dan lainnya, bisa dititipkan kembali kepada BUMDes untuk dipasarkan agar dapat berkembang lebih baik.<sup>92</sup>

Sementara Ibu Anggun menegaskan bahwa pengelolaan unit usaha Rumah Tangga baru dilakukan oleh 1-3 orang saja, sehingga jenis produk yang dimiliki BUMDes baru sedikit jenisnya. Ia mengaharapkan masyarakat dapat percaya kepada BUMDes untuk mengembangkan usaha mereka demi manfaat bersama.

#### c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi di butuhkan dalam kegiatan BUMDes agar semua unit usaha yang di bentuk BUMDes berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya merupakan tugas dan kewajiban pengurus dan anggota BUMDes serta Pemerintah Desa setempat. Kalau tidak ada kegiatan ini,

---

<sup>92</sup> Agus Guntoro, Wawancara 17 Juli 2017

unit usaha yang di didirikan akan berhenti dan bisa merugikan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu juga, peran masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting. Tahap ini masyarakat ikut dilibatkan guna mengawasi berjalannya setiap unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dijelaskna oleh Bapak Hajuli bahwa masyarakat memang benar harus dilibatkan dalam mengawasi segala kegiatan Desa. Apalagi saat ini, dana Desa kan sanagt tinggi, kalo masyarakt tidak mengawasi dengan baik, takutnya ada penyimpangan yang dilakukan Aparat Desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi adalah melaporkan setiap gerak pengurus BUMDes dan Aparat Desa yang kurang baik misalnya, ikut dalam rapat Desa, mengamati perkembangan pembangunan Desa dan sebagainya. Namun sayangnya hal demikian masyarakat masih kurang peduli, sehingga masyarakat kalau ada kesalahan di Desa hanya bisa berbicara di luar.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Hajuli, Wawancara 20 Juli 2017

**BAB IV**  
**PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DESA HANURA**  
**MELALUI BUMDES**

**A. Pengembangan Ekonomi Melalui BUMDes**

Pada bab ini menjelaskan hasil-hasil dari penelitian yang didapatkan dari penelitian dan menjelaskan mengenai bagian-bagian sebelumnya. Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilihat adanya, kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes yang berjalan baik. Berdasarkan hasil lapangan, hadirnya BUMDes memberi kontribusi yang baik bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pemasukan tambahan Desa berasal dari kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh BUMDes.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Desa perlu mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah pusat, karena pada dasarnya kemajuan bangsa berawal dari pembangunan desa yang baik. Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi

kemisikinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam maju kembangnya kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan berlakunya UU tentang Desa. Seiring berjalannya waktu, Desa menjadi prioritas utama dalam hal pembangunan, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur yang arahnya pada pengembangan potensi desa, sehingga dana kucuran untuk desa sangat tinggi. Pada hakikatnya hal demikian sangatlah baik, namun pada nyatanya monitoring pemerintah desa terhadap dana desa tersebut kurang baik, sehingga banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa.

Selanjutnya, demi mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah pusat juga membuat kebijakan baru tentang wajib adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa sebagai upaya membantu unit usaha kecil masyarakat terkelola dengan baik. BUMDes juga hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu desa yang memiliki BUMDes adalah Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten

Pesawaran. BUMDes Desa Hanura di beri nama Hati Nurani, yang berdiri sejak tahun 2015.

Berdasarkan teori dalam BAB II telah di bahas bahwa pengembangan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Pengembangan ekonomi masyarakat ini juga merupakan bentuk dari pembangunan desa. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan adanya BUMDes diharapkan membantu meningkatka kualitas hidup masyarakat . Namun tidak banyak BUMDes yang hadir peran dan kontribusinya sesuai dengan visi dan misi BUMDes itu sendiri

Berdasarkan hasil penelitian, BUMDes Desa Hanura termasuk salah satu BUMDes yang aktif. Selama dua than terakhir ini, bentuk pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes yaitu :

### **1. Pengelolaan Pasar**

Pasar Ampera Desa Hanura merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui pasar, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya. Dengan adanya pasar itu BUMDes mengelola 2 unit usaha yaitu pengelolaan sampah dan parkir. Berdasarkan hasil lapangan, pengelolaan sampah dan parkir menjadi tempat pemasukan dana terbesar bagi desa. Melalui pengelolaan sampah dan parkir, desa memiliki barang renting yang bisa disewakan kepada masyarakat sesuai kebutuhan.

Pengelolaan pasar ini perlu ditingkatkan kembali management pengelolaannya akan tetap berlanjut. Bukan hanya memberi pemasukan besar bagi desa, melalui pengelolaan sampah masyarakat sangat merasakan manfaatnya dalam menanggulangi

sampah yang menumpuk, dan juga bagi masyarakat lainnya dapat memiliki peluang kerja dengan bisa mengambil barang-barang yang bisa dijual kembali, dan bekerja sebagai penjaga parkir. Kedepannya pengelolaan pasar harus benar-benar melibatkan masyarakat, dan secara keseluruhan, dana masukan dan pengeluaran bisa masyarakat rasakan manfaatnya dengan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena sampai saat ini dana yang sudah terkumpul masih disimpan oleh desa. Jadi belum dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.

## **2. Unit Produk dan Jasa**

Berdasarkan hasil interview dengan Bapak Zikri selaku ketua BUMDes bahwa pada hakikatnya produk yang dijual oleh BUMDes adalah jasa. Melalui jasa, dapat meningkatkan skill dan kemampuan masyarakat. Seperti jasa renteng, jasa loket, jasa konter ( servis hp) dan lainnya, yang hasilnya lebih baik dari pada menjual produk mentah.

Pengelolaan produk dan jasa yang dikelola oleh BUMDes pengelolaannya masih kurang tidak seperti pengelolaan sampah dan parkir. Pada unit usaha ini juga, berdasarkan hasil observasi, pengelolaannya langsung dilakukan oleh pengurus BUMDes yang itu juga merupakan Aparat Desa. Hal demikian membuat kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Hal itu harus menjadi pertimbangan pengurus BUMDes dan Aparat Desa, karena memang hakikatnya BUMDes harus mengedepankan kepentingan masyarakat setempat yang kekurangan lapangan pekerjaan.

## **3. Industri Rumah Tangga**

Unit usaha industri rumah tangga yang dikelola BUMDes bekerjasama dengan Kelompok Wanita Tani ini merupakan hal yang sangat baik sekali. Kelompok Wanita Tani merupakan kelompok Ibu-ibu yang melakukan pemberdayaan dirinya untuk membantu perekonomiannya melalui kegiatan-kegiatan membuat produk dengan bahan yang mereka miliki. Sebelum adanya BUMDes produk mereka kurang diminati masyarakat karena hanya dititipkan kebeberapa warung saja, namun sejak berdirinya BUMDes membantu pemasaran produk yang dimiliki Kelompok Wanita Tani tersebut.

Salah satu produk andalannya adalah keripik tempe sagu dan sirup belimbing wuluh yang sekarang menjadi produk icon Desa Hanura. Pengelolaan unit usaha rumah tangga ini bukan dengan cara pengurus BUMDes yang membuat produk, tapi BUMDes hanya sebagai jembatan pemasaran bagi produk masyarakat. Produk itu menjadi produk BUMDes tapi hasilnya penjualan 85 % untuk pemilik produk tersebut.

Ketiga bentuk unit usaha yang dikelola oleh BUMDes di atas mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tersedianya lapangan kerja baru bagi masyarakat, dan membantu jasa pemasaran produk masyarakat. Untuk pengelolaan dana, meskipun dana terpisah dengan dana Desa, namun keuntungan yang diperoleh dari BUMDes masuk ke dalam Desa, yang kemudian digunakan untuk kepentingan Desa. Evaluasi dari unit usaha yang di kelola BUMDes bagaimana melibatkan masyarakat untuk ikut mengelola unit usaha tersebut secara langsung bukan hanya dikelola oleh pengurus saja yang juga merupakan aparat Desa. Karena hal tersebut

tidak sesuai dengan teori yang terdapat pada BAB II Halaman 30 bahwa modal yang di dapatkan oleh BUMDes harus bergulir kembali untuk kegiatan usaha masyarakat.

Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya. Maka dari itu Pengembangan ekonomi masyarakat butuh proses dan butuh tindakan nyata dan kolektif masyarakat untuk sampai pada kondisi yang baik . Pada BAB II Halaman 46 dijelaskan langkah-langkah Pengembangan ekonomi masyarakat yaitu pelatihan usaha, pemagangan, penyusunan proposal, dan permodalan. Sedangkan usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program BUMDes, yaitu :

a. Penyuluhan

Di lihat dari kebermanfaatan, kegiatan ini harus *continue* dan rutin dilakukan agar masyarakat mengetahui dan dapat ikut serta merealisasikan proses pengembangan ekonomi dan pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, penuli menganilis bahwa kegiatan pelatihan ini dilakukan kurang efektif, sehingga hanya beberapa masyarakat diwilayah tertentu yang mengetahui keberadaan BUMDes, sehingga kegiatan dan segala informasi tentang BUMDes hanya diketahui oleh mayarakat wilayah yang dekat dengan kantor BUMDes saja. Karena BUMDes berdiri harus sesuai dengan inisiatif dan



kebutuhan masyarakat, kedepannya komunikasi pihak BUMDes dengan masyarakat secara menyeluruh harus di perbaiki kembali. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi terbentuknya BUMDes tercapai.

b. Pelatihan usaha

Seperti halnya kegiatan penyuluhan, kegiatan pelatihan usaha ini hanya di ikuti oleh perwakilan satu wilayah saja, 3 wilayah lainnya tidak mengikuti pelatihan tersebut karena alasan tidak sampainya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Seharusnya pelatihan ini dilakukan untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Desa Hanura. Karena sasarannya masyarakat, jadi masyarakat harus seluruhnya dilibatkan. Pelatihan ini dilakukan harus mengutamakan bagaimana masyarakat punya usaha sendiri-sendiri, contohnya bisa dilakukan dengan mengadakan cluster kewirausahaan. Misalnya wilayah A memiliki usaha kerajinan, Wilayah B makanan, dan lain sebagainya. Kegiatan ini harus dilakukan kembali agar masyarakat bisa berdaya dan mandiri.

c. Permodalan

Permodalan dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah. Dengan adanya unit simpan pinjam masyarakat juga bisa menjadi modal membantu masyarakat mengembangkan usahanya.

BUMDes harus menyisihkan secara khusus dana yang terkumpul untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena kalau sudah masuk dalam keuangan

Desa, Dana tersebut pasti digunakan untuk kebutuhan fisik Desa, dan masyarakat kembali tidak diperhatikan kegiatan usahanya.

Permodalan yang dilakukan BUMDes harus di monitoring kembali agar masyarakat yang membutuhkan permodalan dalam mengembangkan usaha bisa terbantu, sehingga BUMDes tidak akan mati.

### **B. Partisipasi Masyarakat Desa Hanura terhadap Pengelolaan BUMDes**

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan profesional. Adanya BUMDes merupakan upaya agar setiap program pemerintah sifatnya *Top Down* berubah menjadi *Bottom Up*, dimana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan setiap program. Karena dasar pemikiran terbentuknya BUMDes adalah BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes, yaitu :

#### **1. Perencanaan**

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat masih sangat kurang sehingga semua program yang dijalankan dari BUMDes ditentukan oleh Aparat Desa setempat. Namun hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi Pengurus BUMDes dengan masyarakat setempat.

Perencanaan yang baik adalah melibatkan masyarakat agar dibentuknya suatu program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perencanaan ini, masyarakat harus tau secara detail tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Apalagi BUMDes adalah badan usaha yang saat ini wajib ada di setiap Desa, kalau masyarakat tidak dileibatkan dalam proses pembentukannya, adanya BUMDes itu akan sia-sia.

## 2. Pelaksanaan

Setiap program sasaran utamanya adalah masyarakat setempat. Jika masyarakat tidak ikut serta, kegiatan pengembangan usaha masyarakat tidak akan terealisasi.

Pada tahap ini, 50 % masyarakat Desa Hanura sudah mulai ikut serta mensukseskan unit usaha yang berdiri. Masyarakat banyak yang menggunakan jasa dan produk yang dimiliki BUMDes seperti membayar listrik, menitip produknya ke warung BUMDes dan lainnya.

## 3. Monitoring dan Evaluasi

Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan Desa adalah kewajiban seluruh masyarakat Desa Hanura. Maka partisipasi masyarakat dalam monitoring juga dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan bisa berlanjut dan tidak mengalami penyimpangan. Pada tahap ini masyarakat belum secara optimal, masyarakat belum mengerti bagaimana pengelolaan BUMDes yang sebenarnya. Sehingga masyarakat

tidak mengetahui setiap dana desa yang keluar, apa saja pengeluaran Desa, dan samapi pada pemasukan Desa dari setipa unit usaha BUMDes, masyarakat kurang faham. Hal itu karena, setiap rapat, informasinya kurang sampai kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pengembangan ekonomi masyarakat masih kurang baik, sehingga pengelolaan unit usaha BUMDes masih sifatnya *Top Down* dan masyarakat hanya mengetahui ketika akan diadakannya pelaksanaan dan pendirian beragam usaha.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Pengembangan Ekonomi Melalui BUMDes**

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa adanya BUMDesa mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes member peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDes memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Pengelolaan BUMDes Desa Hanura dilakukan secara baik, dana yang terkumpul masuk kedalam Kas Desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik.

Adanya berbagai unit usaha yang di kelola oleh BUMDes Hati Nurani memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan BUMDes. Memberi lapangan kerja bagi masyarakat, usaha masyarakat termobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat.

##### **2. Partisipasi Masyarakat Desa Hanura terhadap Pengelolaan BUMDes**

Partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan suatu program baik yang dirancang oleh desa ataupun pusat. Masyarakat adalah subjek dan objek dari

kegiatan, karena itu partisipasi sangat dibutuhkan program sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sebenarnya masyarakat itu sendiri.

Kemudian, untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes Hati Nurani masih sangat minim. Baik secara perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi masih minim. Hal demikian karena kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang bisa peneliti berikan, yaitu :

1. Dalam perencanaan program dan membentuk unit usaha harus melibatkan masyarakat, agar masyarakat bisa berpartisipasi dengan baik dalam pengambilan kebijakan dari pengelolaan BUMDes.
2. Untuk pemerintah Desa, buatlah kondisi Desa yang transparan dan terbuka, sehingga perencanaan program, anggaran Desa masyarakat mengetahui agar tidak bersifat Top Down dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini bisa dilakukan dengan rutin melakukan musyawarah desa.
3. Untuk pengurus dan anggota BUMDes buatlah Cluster kewirausahaan bagi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat di setiap wilayahnya agar pengembangan ekonomi masyarakat berjalan terpadu dan merata. Bukan hanya dirasakan pada wilayah yang dekat dengan kantor BUMDes saja. Bukalah unit usaha yang sifatnya kontinyu, dan berikan pelatihan kewirausahaan masyarakat secara berlanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ai Siti Farida, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Atik Budiarto, 2002, *Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Edi Sueharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung PT. Rekan Aditama.
- Hayat. 2013. Realokasi Kebijakan Fiskal; Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013.
- Henry Faisal, 2010, *Ekonomi Media*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2001, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ismail Nawawi, 2009, *Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara.
- Jhingan, 2004, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jim ife Frank, 2008, Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi :Community Development*, terj. Sastrawan Manulang dkk., Yogyakarta , Pustaka Pelajar
- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Reseach* Cet. II, Bandung : Masdar Maju.
- Koetjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Pt. Gramdia Pustaka.
- Lexy J. Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Maryunani, 2008, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Noor Juliansyah dan Ahmadi, 2013, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa

Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa*, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.

Seyadi. 2003. *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.

Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bandung : CV.Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum dan Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta : Raja Grafindo.

Soetomo, 2008, *Pembangunan Masyarakat* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sutoro Eko, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Bandung, Alfabeta CV.

Supriyati Istiqamah, 2008, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandar Lampung, Fakultas Dakwah

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta , Graha Ilmu

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, Cet Ke-1.

Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta : Kencana

Willy Wirasamita. 2014. *Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. (<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>. Diakses tanggal 12 April 2017).



Admikon koperasi.net Oct 23, 2016, terdapat di <http://www.koperasi.net/2016/10/bumdes-dan-koperasi-desa.html>, di akses pada tanggal 12 April 2017

Dita Angga Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa*, ditulis pada tanggal 26 Januari 2017, terdapat di <https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-des-1485440604>, diakses pada tanggal 10 April 2017

<http://www.presidentri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-des-melalui-bumdes.html>, diakses pada tanggal 12 April 2017

Terdapat di <http://www.jabar-online.com/2017/05/strategi-pengembangan-pembangunan.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017

Rina Purba, *Pengertian Perkembangan Ekonomi*, online, terdapat di <http://RinaldhiePurbaSiboroakunt.blogspot.com/2013/10/pengertian-perkembangan-ekonomi.html> diakses pada tanggal 02 mei 2017



## Lampiran IV

### DAFTAR NAMA SAMPEL

No.	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	Chodri Cahyadi	Guru Honorer	Kepala Desa
2.	Agus Kuncoro	Wiraswasta	Sekretaris Desa
3.	Suparno	Nelayan	Kepala Wilayah D
4.	Dzikri	Guru Honorer	Pengurus BUMDes
5.	Paijo	Tani	Pengurus BUMDes
6.	Ea	IRT	Pengurus BUMDes
7.	Hajuli	Wiraswasta	Pengurus BUMDes
8.	Anggun	Pedagang	Masyarakat
9.	Zahara	Wirausaha	Masyarakat
10.	Herlina	Wirausaha	Masyarakat



## DOKUMENTASI







